

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja merupakan pencapaian suatu tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Kinerja keuangan dinilai dengan tingkat efektifitas operasional perusahaan. Kinerja termasuk suatu pengawasan yang terus menerus dan pelaporan penyesuaian program, terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya.

Menurut Munawir (2010) pengukuran kinerja keuangan perusahaan memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, dimana perusahaan dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, dimana perusahaan dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut likuiditas.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu perusahaan dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode

tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aset atau ekuitas secara produktif.

4. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu perusahaan dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap stabil, yang diukur dari kemampuan perusahaan dalam membayar pokok utang dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami kesulitan atau krisis keuangan.

Adapun manfaat dari penilaian kinerja perusahaan menurut Batubara (2014) :

1. Prestasi suatu organisasi dalam periode tertentu dapat dinilai menggunakan kinerja keuangan dikarenakan dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Untuk penilaian pencapaian dan kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini terdiri dari *quick ratio*, *current ratio*, dan *net working capital*.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio ini terdiri dari *debt ratio*, *debt to equity ratio*, *long term debt to equity ratio*, *long term debt to capitalization ratio*, *times interest earned*, *cash flow interest coverage*, *cash flow interest coverage*, *cash flow to net income*, dan *cash return on sales*.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya. Rasio ini terdiri dari *total asset turnover*, *fixed asset turnover*, *account receivable turnover*, *inventory turnover*, *average collection period*, dan *day's sales inventory*.

4. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini terdiri dari *net profit margin*, *gross profit margin*, *return on assets*, *return on equity*, dan *operating ratio*.

5. Rasio pasar

Rasio pasar merupakan rasio yang menunjukkan informasi penting perusahaan dan diungkapkan dalam basis per saham. Rasio pasar terdiri dari *dividend yield, dividend per share, dividend payout ratio, price earning ratio, earning per share, book value per share, dan price to book value*.

Pada penelitian ini kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE). Perusahaan yang memiliki laba dan keuntungan yang tinggi tentu akan menarik perhatian para pemegang saham, jika perusahaan menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya investor yakin atas pengembalian dana di masa yang akan datang, sehingga ROE dapat dijadikan pedoman bagi investor untuk melihat baik atau tidaknya suatu perusahaan karena semakin tinggi rasio ROE maka semakin tinggi tingkat pengembalian dana yang diinvestasikan oleh investor dalam perusahaan serta kinerja dari perusahaan tersebut tentu akan mengalami peningkatan.

Menurut Kasmir (2012):

“*Return On Equity* (ROE) adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri”.

Sedangkan menurut Fahmi (2012):

“*Return on equity* adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas”.

Return On Equity (ROE) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Earning after tax}}{\text{Total Equity}}$$

Sumber : Kasmir (2012)

2.2. Good Corporate Governance

Menurut Agoes dan Ardana (2014) :

“*Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak- hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur hubungan antar semua pihak pemangku kepentingan dan berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan pengelolaan perusahaan sesuai dengan etika bisnis sehingga terciptanya peningkatan kinerja perusahaan.

1. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

- a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*) dimaksud sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggung jawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen dan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas (*division of authority*) antar-organ perusahaan serta mengurangi dampak dari *agency problem* yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:

1) Akuntabilitas individual

Akuntabilitas individual merujuk kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan-bawahan. Akuntabilitas berlaku kepada kedua belah pihak, baik yang mempunyai wewenang dan yang mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang.

2) Akuntabilitas tim

Akuntabilitas tim merujuk kepada adanya akuntabilitas yang ditanggung bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dari kinerja yang tercapai.

3) Akuntabilitas korporasi

Akuntabilitas korporasi merujuk kepada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya..

b. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

c. Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material tentang :
 - a) Keuangan dan hasil operasi perusahaan.
 - b) Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan bisnis dan masyarakat umum.
 - c) Kepemilikan saham mayoritas dan hak-hak suara dengan adanya keterbukaan, para investor mendapatkan informasi yang berhubungan dengan hak-hak mereka sebagai pemilik saham.
 - d) Anggota dewan komisaris serta penghasilannya.
 - e) Faktor-faktor risiko akan datang, yang material informasi yang penting lainnya adalah tentang risiko yang sekiranya dapat diduga dari informasi yang didapatkan.
 - f) Isu-isu yang berhubungan dengan para karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya.
 - g) Struktur dan kebijakan *governance*.
- 2) Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi dibidang akuntansi, pengungkapan keuangan dan non-keuangan, serta audit.
- 3) Pemeriksaan tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independent untuk menyediakan jaminan keyakinan eksternal yang objektif tentang cara penyajian dan penyajian laporan keuangan.

4) Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan.

d. Kesetaraan (*Fairness*)

Pemberlakuan prinsip ini diperusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

e. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.

2. Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Menurut FCGI (2013) manfaat penerapan *Corporate Governance* antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan karena proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik sehingga menghasilkan keputusan yang optimal , meningkatkan efisiensi serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. *Good Corporate Governance* meminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak manajerial perusahaan. Hal ini akan menekan kemungkinan kerugian (*agency cost*) bagi perusahaan maupun pihak yang berkepentingan lainnya akibat tindakan tersebut.
3. Memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, reabilitas, tanggung jawab dan keadilan dalam rangka memperkuat posisi perusahaan. Peningkatan nilai saham akan meningkatkan kepercayaan investor untuk meningkatkan investasi mereka. Bagi para pemegang saham, penerapan *Good Corporate Governance* dengan sendirinya akan meningkatkan nilai dividen yang mereka terima.
4. Penerapan *Corporate Governance* akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan lebih hati-hati dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan karena adanya kewajiban untuk mematuhi aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku.

2.2.1. Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independent atau semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan di perusahaan, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris, Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi dengan efektif dalam melindungi perusahaan dari risiko sekaligus melindunginya dari tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya.

Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara manajer internal. Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh komisaris independen adalah mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Misi komisaris independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.

a. Tugas Komisaris Independen

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT), mengatur mengenai tugas dan fungsi komisaris :

- 1) Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
- 2) Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.
- 3) Anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.
- 4) Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi serta setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- 5) Memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain : menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain, diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas organ perseroan.

- 6) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan direksi dalam pengelolaan perusahaan di mana perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar yang diberikan perusahaan termasuk kepada pemegang saham minoritas, sehingga prinsip kewajaran dan kesetaraan dapat terlaksana dengan baik.

Komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator jumlah seluruh anggota komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan. Dimana komposisi dewan komisaris dewan komisaris salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi akuntansi yang ada.

Komisaris Independen dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

Sumber : Thesarani (2016)

2.2.2. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Menurut Pasal 1 dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili

perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan; sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dewan direksi memiliki tugas antara lain :

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (*manajer*).
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Menurut Bukhori (2012), dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal.

Menurut Alhamdi (2015) dewan direksi dapat diukur dengan menggunakan jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan.

Dalam penelitian ini dewan direksi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Dewan Direksi}$$

Sumber : Shabibah (2017)

2.2.3. Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI):

“Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan”.

Komite audit terdiri dari komisaris independen yang terpilih memiliki tanggung jawaban membantu dalam penetapan auditor independen yang diusulkan oleh manajemen. Pada umumnya komite audit terdiri dari 3 sampai 5, sebagian perusahaan juga memiliki 7 orang anggota komite audit yang bukan berasal dari manajemen perusahaan.

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang bersifat independen dan dipilih secara khusus untuk peningkatan pengawasan internal perusahaan. Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional Good Corporate Governance (KNGCG) pada 30 Mei 2002, antara lain disebutkan bahwa :

1. Rekomendasi utama dalam pedoman tentang pembentukan komite audit
 - a) Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris.
 - b) Wewenang dan tugas komite audit memiliki ketentuan-ketentuan tertulis.

- c) Pemeriksaan dan pengawasan dalam proses pelaporan keuangan dan kontrol internal adalah tugas utama komite audit.
 - d) Anggota komite audit harus diangkat dari anggota dewan komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas.
 - 1) Paling sedikit tiga anggota.
 - 2) Mayoritas harus independent.
2. Tujuan pembentukan komite audit
- a) Pelaporan keuangan.
 - b) Manajemen risiko dan kontrol.
 - c) Tata kelola perusahaan.
3. Fungsi komite audit
- a) Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.
 - b) Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
 - c) Memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independent dan memainkan suatu peranan yang positif.
 - d) Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.

- e) Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif.
 - f) Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
 - g) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.
4. Peran komite audit di bidang tata kelola perusahaan
- a) Mengawasi proses tata kelola perusahaan.
 - b) Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan tata kelola perusahaan.
 - c) Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada *code of conduct*.
 - d) Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat memengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan.
 - e) Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
 - f) Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan tata kelola perusahaan dan temuan lainnya.

Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit. Bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati

sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Hal ini dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earning management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berterima umum dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut :

Komite Audit = Jumlah Komite Audit

Sumber : Shabibah (2017)

2.3. Ukuran Perusahaan

Suatu skala dimana perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar atau kecil disebut dengan ukuran perusahaan (Sawitri et al, 2017). Sebuah perusahaan tentu memiliki aset, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan tentu menandakan bahwa ukuran dari perusahaan tersebut besar pula. Seluruh aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional dilihat sebagai ukuran dari perusahaan. Perusahaan besar dapat dipastikan bahwa semakin besar juga dana yang dikelola oleh perusahaan dan semakin kompleks pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga resiko yang dimiliki oleh perusahaan juga semakin tinggi oleh karena itu perusahaan harus terus meningkatkan kinerja keuangannya.

Ukuran perusahaan dapat dirumuskan dengan :

$SIZE = LN (\text{Total Assets})$

Sumber : Purnamasari (2019)

2.4. Kerangka Konseptual

2.4.1. Kerangka Pemikiran

Kinerja perusahaan merupakan variabel dependen yang bertujuan untuk memaksimalkan penerapan *good corporate governance* pada perusahaan. Perusahaan yang mampu dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki kinerja keuangan perusahaan yang sudah baik juga.

Good corporate governance memiliki hubungan yang erat dengan kinerja keuangan perusahaan. GCG dapat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, serta dengan tata kelola perusahaan yang baik kepercayaan investor terhadap perusahaan akan meningkat sehingga investor memiliki kepercayaan untuk menanamkan modal pada perusahaan, tentu hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.4.2. Hubungan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang objektif dan menetapkan kesetaraan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pemegang saham dalam pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh komisaris independen.

Manajemen perusahaan yang dilaksanakan dengan baik tentu dikarenakan pengambilan keputusan yang tepat, dimana komisaris independent melakukan peran pengendalian dalam mengevaluasi keputusan manajer melalui keterampilan, keahlian pengetahuan dan objektivitas. Perusahaan yang mempunyai presentasi komisaris independen yang rendah tentu akan mengalami pengawasan yang rendah juga, begitu sebaliknya jika perusahaan memiliki tingkat pengawasan yang tinggi maka perusahaan yang memiliki pengawasan yang tinggi maka kinerja keuangannya akan stabil dan tidak menutup kemungkinan untuk terus meningkat sehingga semakin rendah kemungkinan mengalami tekanan keuangan.

2.4.3. Hubungan Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Salah satu indikator yang dikategorikan sebagai indikator yang vital dalam pelaksanaan *corporate governance* adalah dewan direksi karena memiliki tanggung jawab dalam manajemen perusahaan. Tugas dari dewan direksi dalam suatu perusahaan adalah untuk menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi yang harus dibuat oleh dewan direksi dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Jika dewan direksi mampu melaksanakan strategi dengan tepat dan membuat kebijakan dengan baik serta setiap kebijakan dibuat oleh dewan direksi yang cakap dalam pelaksanaan tugasnya maka perusahaan akan mengalami peningkatan dalam manajemennya yang akan berpengaruh juga terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

2.4.4. Hubungan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit dipilih untuk membantu auditor untuk mempertahankan independen dari manajemen dan melindungi hak pemegang saham dengan mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan kinerja manajemen dalam bidang penyusunan laporan keuangan dan pengendalian internal.

Kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat jika perusahaan mampu mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kenaikan pada harga saham nya. Hal tersebut dapat diraih jika komite audit yang bertugas dalam penyusunan laporan keuangan bekerja dengan efektif serta penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan tetap menggunakan prinsip independensi maka akan menghasilkan kualitas laba yang baik tanpa direkayasa dalam proses penyusunannya sehingga investor juga akan semakin tertarik dalam menanamkan sahamnya pada perusahaan yang berakibat saham akan meningkat dan sebagai pertanda kinerja keuangan perusahaan sudah terlaksana dengan baik.

2.5. Penelitian Terdahulu

2.5.1. Afni Eliana Saragih dan Yan Christin Br Sembiring (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring dan Saragih (2019) menggunakan variabel independen komisaris independent dan komite audit dan menggunakan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. Penelitian terdahulu menetapkan seluruh perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2017 sebagai objek penelitian yang dilakukan. Sembiring dan Saragih (2019) melakukan penelitian dengan menggunakan alat uji regresi. Hasil dari penelitian ini komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5.2. Dewi Hanifia Ratna (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2019) menggunakan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen dan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 sebagai objek penelitian.

Peneliti Ratna (2019) menggunakan alat uji regresi. Hasil penelitian adalah komisaris independent berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.5.3. Lola Angela (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Angela (2018) menggunakan tiga variabel independent yaitu dewan direksi, komisaris independent dan ukuran perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 sebagai objek penelitian. Angela (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan alat penelitian uji regresi. Hasil penelitian ini adalah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5.4. Kuslinah Riniati (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Riniati (2015) menggunakan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen dan komisaris independen dan komite audit sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 sebagai objek penelitian.

Peneliti Riniati (2015) menggunakan alat uji regresi. Hasil penelitian adalah komisaris independent berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.5.5. Nurul Rifa Yuliani (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2018) menggunakan tiga variabel independent yaitu komisararis independen, komite audit dan rasio leverage dan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 sebagai objek penelitian. Yuliani (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan alat penelitian uji regresi. Hasil penelitian ini adalah komisararis independent berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan rasio leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5.6. Ridwan Salim (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Salim (2016) menggunakan tiga variabel independent yaitu dewan direksi, dewan komisaris dan komisaris independent dan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2014 sebagai objek penelitian. Salim (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan alat penelitian uji regresi. Hasil penelitian ini adalah dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan

komisaris independent tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5.7. Putri Athaghina Purnamasari (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2019) menggunakan lima variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris, frekuensi pertemuan dewan komisaris, komisaris independent, gender anggota komisaris dan latar belakang Pendidikan dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini juga memiliki variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 sebagai objek penelitian. Purnamasari (2019). Hasil penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris dan frekuensi pertemuan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan komisaris independent, gender anggota komisaris dan latar belakang Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

2.5.8. Devita Mutiara Saragih (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2018) menggunakan lima variabel independent yaitu kepemilikan nstitusional, mekanisme dewan komisaris, dewan direksi, mekanisme komite audit, audit eksternal dan kinerja keuangan sebagai

variabel dependen. Dalam penelitian ini juga memiliki variabel kontrol yaitu umur perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan DER.

Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 sebagai objek penelitian. Saragih (2018) Hasil penelitian ini adalah kepemilikan institusional dan audit eksternal berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan mekanisme dewan komisaris, dewan direksi dan mekanisme komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
Sembiring dan Saragih (2019)	X1:Komisaris Independen X2:Komite Audit Y:Kinerja Keuangan Perusahaan	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Uji Regresi	X1:Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan X2 : Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
Ratna (2019)	X1:Komisaris Independen X2: Dewan Direksi X3: Komite Audit Y: Kinerja Keuangan	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Uji Regresi	X1: Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan X2: Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan X3:Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
Angela (2018)	X1: Dewan Direksi X2: Komisaris Independen X3: Ukuran Perusahaan Y: Kinerja Keuangan	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di	Uji Regresi	X1:Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan X2:Komisaris independent berpengaruh terhadap kinerja keuangan

		Bursa Efek Indonesia		X3:Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
Riniati (2015)	X1: Komisaris Independen X2: Komite Audit Y: Kinerja Keuangan	Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Uji Regresi	X1:Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan X2:Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
Yuliani (2018)	X1:Komisaris Independen X2:Komite Audit X3:Rasio Leverage Y: Kinerja Keuangan	Perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Uji Regresi	X1: Komisaris Independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan X2: Komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan X3: Rasio Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
Salim (2016)	X1:Dewan Direksi X2:Dewan Komisaris X3:Komisaris Independen Y: Kinerja Keuangan	Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Uji Regresi	X1:Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan X2:Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan X3: Komisaris Independen tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
Purnamasari (2019)	X1: Ukuran Dewan Komisaris X2 : Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris X3: Komisaris Independen X4 : Gender Anggota Komisaris X5 : Latar Belakang Pendidikan Y : Kinerja Keuangan	Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.	Uji Regresi	X1 : Pengukuran dengan ROA dan Tobin' Q ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. X2 : Pengukuran dengan ROA dan Tobin'Q frekuensi pertemuan dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

	Z : Ukuran Perusahaan dan Leverage			X3 : Komisaris independent berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan X4 : Gender komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan X5 : Latar belakang Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
Saragih (2018)	X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Mekanisme Dewan Komisaris X3 : Dewan Direksi X4 : Mekanisme Komite Audit X5 : Audit Eksternal Y : Kinerja Keuangan Z : Umur perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan DER	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.	Uji Regresi	X1 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. X2 : Mekanisme Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan X3 : Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. X4 : Mekanisme Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan X5 : Audit Eksternal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komisaris independen merupakan salah satu proksi dalam *good corporate governance* karena peran dari komisaris independen sendiri adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Komisaris independent melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan.

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan jumlah dari komisaris independent. Dengan semakin banyak anggota komisaris independen, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik sehingga masukan yang akan didapat oleh dewan direksi akan jauh lebih banyak karena hal tersebut kinerja keuangan perusahaan juga meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Riniati (2015), Angela (2018), dan Salim (2016) yang berpendapat bahwa dengan peranan komisaris independen pada perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan analisis teori yang ada hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Komisaris Independen Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

2.6.2. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan direksi berperan sebagai pimpinan sebuah perusahaan yang melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja . Dewan direksi sering disebut sebagai organ vital dalam sebuah perusahaan karena memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan. Dewan direksi memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan.

Dewan direksi memiliki tugas menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang di miliki perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah anggota dewan direksi yang lebih banyak akan memungkinkan terjadi peningkatan kinerja keuangan karena semakin banyak jumlah dewan direksi sehingga setiap direksi memiliki tugas dan wewenang yang lebih terfokus sehingga kinerja keuangan perusahaan akan dapat meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2019) dan Salim (2019) yang menyatakan bahwa dengan peranan dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan analisis teori yang ada maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini sebagai berikut :

H2 : Dewan Direksi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

2.6.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komite audit memiliki tugas serta peranan yang penting dan strategis dalam proses penyusunan laporan keuangan, seperti menjaga sistem pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan sistem pengawasan yang memadai dalam perusahaan serta pelaksanaan *good corporate governance* yang baik.

Jumlah dari komite audit yang semakin banyak maka fungsi dalam mengontrol dan mengawasi dari komite audit akan semakin efektif sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik dan memiliki dampak yang lebih baik bagi kinerja keuangan perusahaan. Pendapat ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Riniati (2015) yang menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan analisis dari teori yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan